

# **MEDIA DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI**

M. Taufiq Rahman

Teknologi informasi yang membawa pada keterbukaan media, termasuk media sosial membuat adanya kemungkinan-kemungkinan kehidupan baru yang menuntut pengaturan-pengaturan baru. Berikut ini adalah salah satu pokok bahasan yang menjadi bahan diskusi kelas pada mata kuliah “Industri Teknologi Informasi” Jurusan Sosiologi UIN SGD Bandung Semester VII Tahun 2018/2019.

## **1. Kebijakan Komunikasi**

Apakah teknologi informasi memiliki implikasi yang lebih serius bagi kehidupan politik? Seperti halnya aspek lain dari kehidupan sosial, itu tergantung pada bagaimana orang memilih untuk menggunakan teknologi. Misalnya, menulis blog atau berpartisipasi dalam grup politik Facebook tentang isu-isu lingkungan dapat dilihat sebagai cara bagi warga untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka, menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi, dan terlibat dalam bentuk partisipasi demokratis (Rahman, 2018). Namun, posting dukungan online semacam itu membutuhkan sedikit usaha dan dapat terlepas dari komitmen nyata apa pun. Kegiatan politik semacam ini memiliki sedikit kemiripan dengan aktivitas politik *off-line* dalam mendukung perlindungan lingkungan, seperti mendidik orang lain tentang masalah, berpartisipasi dalam demonstrasi, atau mengubah gaya hidup dengan mengendarai sepeda daripada menggunakan mobil. Selain itu, banyak aktivisme online bersifat individual dan bukan kolektif; Dengan hanya perlu mengklik beberapa tombol dapat terjadi penandatanganan petisi elektronik, pengiriman surat pra-fabrikasi kepada anggota DPR, atau pemberian sumbangan — tetapi ini

sering kali melibatkan komitmen yang sedikit, jika ada, terhadap partisipasi politik yang sedang berlangsung (Rahman, 2014).

Di sisi lain, warga, organisasi akar rumput, dan kelompok yang bekerja untuk perubahan sosial telah menggunakan teknologi media — lama dan baru — untuk mendistribusikan informasi alternatif, mengatur dan memanggil orang untuk bertindak, meningkatkan kesadaran, dan membangun komunitas. Dalam beberapa kasus, orang telah menggunakan teknologi media seperti radio dan televisi untuk tujuan yang berbeda (nonkomersial). Stasiun radio penambang di Bolivia, misalnya, telah aktif selama lebih dari 60 tahun, contoh proyek "radio komunitas," skala kecil, organisasi nirlaba, biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh organisasi lokal, yang menekankan partisipasi lokal, kepemilikan kolektif, dan pemerintahan sendiri (Howley, 2009).

Radio komunitas mungkin paling signifikan di daerah pedesaan di negara berkembang. Misalnya, pada tahun 2006, ada 150 stasiun radio yang menyiarkan dengan lisensi radio komunitas di Afrika Selatan (Bosch, 2010). Di Haiti, di mana sekitar separuh penduduk buta huruf, radio komunitas melakukan peran pendidikan dan informatif yang penting. Menyusul gempa bumi 2010, stasiun radio komunitas, sering mengoperasikan "sistem pengalamatan komunitas" bertenaga surya, membuat warga tetap mendapat informasi tentang tanggap darurat dan masalah kesehatan masyarakat (Milan, 2015).

Meskipun kurang dapat diakses dibandingkan radio, televisi juga telah digunakan untuk tujuan komunitas melalui stasiun akses komunitas dan kendaraan lain. Misalnya, Paper Tiger Television mulai menyiarkan berita alternatif dan komentar di New York pada awal tahun 1981, dan pada tahun 1986, Deep Dish TV menjadi jaringan pertama untuk distribusi nasional produksi video independen lokal.

Proyek media independen ada jauh sebelum media baru seperti blog muncul. Namun, media baru telah mempermudah pembuatan dan distribusi konten independen. Misalnya, para aktivis teknologi telah mendirikan penyedia layanan Internet non-komersial alternatif, yang menawarkan layanan e-mail dan hosting web yang aman bagi pengguna (Milan 2009). Kelompok-kelompok tersebut mengembangkan gagasan bahwa "cara jaringan-jaringan ini diciptakan, dijalankan dan dikembangkan, dicerminkan sebanyak mungkin, sifat langsung, partisipatif, kolektif, dan otonom dari gerakan sosial yang muncul itu sendiri" (Milan 2015). Server-server ini dijalankan oleh sekelompok kecil ahli; mereka beroperasi secara mandiri dari infrastruktur komersial, dan mereka tidak mengenakan biaya untuk layanan yang mereka tawarkan. Di bagian depan perangkat lunak, pengembang akar rumput telah merancang beberapa alat sumber terbuka dari awal dan membebaskannya secara gratis untuk menangkal kebijakan perangkat lunak berpemilik kebanyakan perusahaan komputer multinasional. Perangkat seluler juga terbukti berguna bagi aktivis politik dan telah digunakan untuk memanggil orang-orang untuk beraksi di demonstrasi di seluruh dunia dan berkomunikasi dengan jaringan dukungan yang lebih luas (Milan 2009). Facebook, YouTube, dan media baru lainnya digunakan secara luas oleh para aktivis muda yang penting bagi revolusi Mesir 2011.

Bagi banyak orang, teknologi media baru dapat menawarkan cara yang sangat berbeda dalam mengakses, memanipulasi, dan menggunakan informasi. Tetapi setiap keuntungan komunikasi yang disediakan oleh media baru didistribusikan secara tidak merata, mereplikasi ketidaksetaraan informasi yang ada. Mereka yang sudah lebih terdidik, lebih akrab dengan teknologi yang muncul, dan lebih mampu membeli perangkat komunikasi justru akan menjadi orang yang paling diuntungkan dari media baru.

## 2. Proses Pembuatan Kebijakan

Interaksi antara teknologi dan tata kelola pemerintahan sudah rumit. Pemerintah akan lebih sering diminta untuk mengembangkan dan menindaklanjuti konsep-konsep untuk operasi di lapangan yang semakin ditentukan oleh kemampuan baru yang diberikan oleh teknologi mutakhir dan kecepatan yang dipercepat. Teknologi ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi sifat pemerintahan dan, dalam beberapa contoh, sisi operasional pemerintah (Anwar, Rusmana, Rahman; 2018).

Misalnya, bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan peningkatan kemampuan untuk melakukan *outsourcing* pada pekerjaannya sambil tidak mengorbankan kerahasiaan informasi? Di area lain, isu-isu kebijakan fundamental akan dimunculkan. Misalnya, transformasi yang dibawa oleh manipulasi genetika dan revolusi biologis mungkin akan memberikan tantangan terbesar terhadap kemampuan pemerintah untuk memahami dan mencocokkan laju perubahan. Area ini akan secara langsung mempengaruhi konsep-konsep tradisional pemerintahan karena implikasi etisnya yang substansial.

Pemerintah dan operasinya harus menjadi bagian dari perubahan besar ini sehingga dapat berfungsi secara kredibel. Sejauh mana kita dapat menemukan cara bagi teknologi yang muncul untuk memungkinkan pemerintah dapat memenuhi peran tradisionalnya dalam lingkungan baru ini — serta peran-perannya yang baru? Mengatasi pertanyaan ini membutuhkan pengalihan fokus dari teknologi ke fungsi-fungsi dasar pemerintahan.

Pandangan ini, pada gilirannya, menunjukkan serangkaian tantangan operasional terhadap tata kelola yang efektif. Banyak dari tantangan ini muncul dari perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi seberapa baik pemerintah melakukan peran utamanya. Risiko tersebut terutama terletak pada bidang-bidang berikut:

1. Kita melihat perbedaan yang berkembang antara siklus waktu pemerintah dan perkembangan teknologi. Cukup sederhana, ini menyajikan operasi pemerintah dengan pilihan: Apakah hidup dalam waktu respon yang lebih singkat dan menjalankan risiko seiring tindakan yang dianggap tidak baik (atau tidak bertindak) atau melihat masukan pemerintah menjadi kurang relevan dan menganggap performanya berkurang.
2. Risiko akses informasi yang tidak memadai menjadi besar. Ini melampaui masalah untuk mendapatkan kesadaran dan menyusun seri data yang relevan. Masalah terkait dan dalam banyak hal yang lebih bermasalah adalah masalah pengelolaan dan akuntansi untuk data dan sumber daya pengetahuan lainnya. Tentu saja, ada tugas sentral untuk menganalisis dan menyediakan interpretasi data. Masalah-masalah ini sudah menjadi perhatian dan akan meningkat dalam waktu.
3. Beralih ke isu-isu yang lebih operasional, pelaku sektor publik harus menghadapi masalah mengidentifikasi dan memobilisasi sarana untuk tindakan yang efektif dan tepat. Untuk sebagian besar masalah, kita memiliki pilihan di antara serangkaian pendekatan kebijakan alternatif. Ini tidak bisa dianggap sepele, terutama dalam mengukur mana yang paling tepat, mengingat lingkungan yang ditentukan oleh kelangkaan aturan praktis dan pengalaman sebelumnya. Secara singkat, tindakan pemerintah dapat mengambil bentuk tindakan langsung (misalnya, pilihan yang disengaja untuk investasi atau subsidi dan tindakan penetapan agenda lainnya), tindakan tidak langsung (misalnya, perubahan dalam kebijakan perpajakan), penyediaan bantuan dan tempat (misalnya, memimpin rapat entitas pengguna dan produsen potensial pada tahap pra-persaingan pengembangan teknologi untuk membahas masalah standar, dll.), dan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyebaran informasi aktif (Rahman, Sulthonie, Solihin; 2018).

4. Menentukan lingkup yang sesuai untuk tindakan pemerintah juga cenderung menjadi keputusan yang kurang jelas. Sekali lagi, potensi adanya kekacauan hasil yang terjadi dari berbagai perkembangan teknologi akan melipatgandakan jumlah pemangku kepentingan langsung dan komunitas minat serta sentuhan pada hal-hal yang menjadi perhatian publik. Tetapi di luar ini, kita mungkin juga mempertimbangkan bahwa lingkup pemerintah sebagian besar ditentukan hari ini oleh predikat fundamental geografi dan biologi. Kedua hal ini menjadi lebih terbuka untuk dipertanyakan karena perubahan teknologi menciptakan kedekatan virtual dan mempromosikan kedekatan alternatif di satu sisi, dan, di sisi lain, membawa potensi untuk mengubah asumsi mendasar tentang sifat manusia, kebutuhan, dan kecenderungan. Memutuskan ketika perhatian pemerintah diberikan akan menjadi panggilan yang semakin sulit untuk dibuat.
5. Produk silang dari dua poin pertama menimbulkan masalah lain yang menjadi perhatian operasional, yaitu bagaimana badan pemerintah menilai dan mengukur kinerja dalam seberapa baik mereka telah menjalankan perannya. Lembaga yang mendanai penelitian telah bergulat dengan cara terbaik untuk menerapkan ketentuan-ketentuan kinerja pemerintah. Ini kemungkinan akan tumbuh sebagai masalah karena dua alasan. Salah satunya adalah di mana-mana perkembangan teknologi yang dipercepat dan implikasinya bagi portofolio misi lembaga pendanaan tidak mendukung penelitian dan pengembangan sains (R & D). Alasan kedua adalah karena lembaga-lembaga ini akan berkeinginan untuk menerapkan lebih banyak pendekatan manajerial untuk kegiatan sehari-hari mereka, dan penilaian akan menjadi bagian penting dari pendekatan ini.

6. Layak mendapat perhatian eksplisit, tetapi biasanya hanya tersisa secara tersirat dalam sebagian besar pertimbangan, adalah masalah yang mendasari begitu banyak kekuatan yang membawa tantangan yang tercantum di atas: tantangan mengelola di bawah ketidakpastian.

Apa solusi yang mungkin mengatasi daftar tantangan yang berkembang untuk pemerintahan ini? Beberapa tema umum kemampuan yang berpotensi diinginkan muncul untuk dijalankan melalui daftar ini. Setiap tantangan menyarankan perlunya akses ke informasi dan kemampuan untuk menafsirkan dan menganalisis informasi itu. Di luar ini, dalam setiap contoh, kita memerlukan prosedur untuk memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan publik lebih lanjut. Akhirnya, dan mungkin yang paling menantang, kita membutuhkan alat untuk berpikir melalui tujuan tata kelola dan memberikan navigasi ke arah tujuan tersebut.

Keseimbangan pembahasan ini akan menawarkan beberapa saran untuk menerapkan teknologi yang muncul ke operasi pemerintah baik untuk mempertahankan operasi tersebut di lingkungan baru atau untuk memberikan kemampuan baru sehingga lembaga-lembaga pemerintahan dapat memenuhi tantangan baru ini. Dalam setiap contoh, kita menghadapi tiga alternatif. Kita bisa, entah dengan kemauan atau tidak, gagal memanfaatkan sarana berbasis teknologi baru. Atau kita dapat memilih untuk menggunakan cara-cara tersebut tetapi hanya sebagai akses pada pola dan prosedur operasi yang ada. Di sinilah perlunya merekayasa ulang pendekatan mendasar dalam cahaya kemungkinan berbasis teknologi baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, R. K., A. Rusmana, and M. T. Rahman. "The Politics Of Information On Traditional Medical Practices In Bandung Barat. MIMBAR." *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 34, no. 1 (2018).

- Bosch, Tanja. "Talk radio, democracy and citizenship in (South) Africa." In *Popular media, democracy and development in Africa*, pp. 91-104. Routledge, 2010.
- Howley, Kevin. "Community media studies: an overview." *Sociology Compass* 7, no. 10 (2013): 818-828.
- Milan, Stefania. "Four steps to community media as a development tool." *Development in Practice* 19, no. 4-5 (2009): 598-609.
- Milan, Stefania. "From social movements to cloud protesting: the evolution of collective identity." *Information, Communication & Society* 18, no. 8 (2015): 887-900.
- Rahman, M. Taufiq. *Pengantar filsafat sosial*. Bandung: Lekkas, 2018.
- Rahman, M. Taufiq. *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories*. Scholars' Press, 2014.
- Rahman, Mohammad Taufiq, Ahmad Agus Sulthonie, and Solihin Solihin. "'Sosiologi Informasi Pengobatan Tradisional Religius' Kajian di Masyarakat Perdesaan Jawa Barat." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 100-111.